

**MANAJEMEN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS MOBIL DINAS)**

Oleh :

Nike Ima Elia Limbong

Email : nikelimbong48@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

NIKE IMA ELIA LIMBONG, 1201112472. Asset Management of Pekanbaru Area (Case Study Official Car) Supervised by: Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si.

Asset manajemen of Pekanbaru area case study official car current public concern which has not been maximal asset management area viewed by phenomenas that exist, there few device work unit area not finished yet to trace his official car, the Audit Board of the Republic of Indonesia on financial management and asset Pekanbaru area within the last seven years get opinion qualified opinion six time in a row, still there former member of the official car Member of Parliament Pekanbaru is be returned yet, there is still the official car used to shopping areas or not on purpose. Formulation of the problem in this research is how asset management of Pekanbaru Area (case study official car) and what factors affect the asset management of Pekanbaru Area (case study official car).

The purpose of this research is to understand and analyze asset management of Pekanbaru Area (case study official car) and factors affect the asset management of Pekanbaru Area (case study official car). This research uses Siregar theory eith indicator: asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization, and supervision and controlling.

This research methods is using exploratory qualitative approach. Informants in this research are member or Financial Management Agency Pekanbaru City Asset, the Area Secretariat, civil service police unit, Member of Parliament Pekanbaru, user official car, Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation.

The results of this research is the performance of asset management of Pekanbaru Area less than maximal. This was evidenced by there few device work unit area not finished yet to trace his official car, the Audit Board of the Republic of Indonesia on financial management and asset Pekanbaru area within the last seven years get opinion qualified opinion six time in a row, still there former member of the official car Member of Parliament Pekanbaru is be returned yet, there is still the official car used to shopping areas or not on purpose. Factors affecting the performance of the immigration office of human resources, tasks, policies

Keywords: Asset Management and Official Car

A. PENDAHULUAN

Dengan bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, maka secara otomatis telah membawa *konstelasi* pemerintahan daerah, baik secara administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi. Melalui kebijakan ini pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi dibidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dibidang keuangan daerah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sarana

perlengkapan kerja yang memadai. Termasuk penyediaan kendaraan dinas operasional, rumah dinas, biaya perjalan dinas dan lain-lain. Pemberian fasilitas semata-mata adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai serta percepatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah (*municipal asset management*) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Padahal, inventarisasi aset merupakan "jantung" didalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang sebenarnya berpotensi dan memiliki peluang investasi tinggi. Masalah yang paling sering kita jumpai yaitu tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pentingnya manajemen aset yang baik, melihat fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan keadaan aset terkhusus mobil dinas di kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Masih adanya mobil dinas pada Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PU Kota Pekanbaru yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.
2. Opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan aset kota Pekanbaru yang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir mendapatkan enam kali berturut-turut opini WDP.
3. Masih ada 5 unit mobil dinas yang masih ditahan oleh mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
4. Masih terdapat mobil dinas yang penggunaannya belum maksimal atau belum tepat pada peruntukannya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba

melakukan penelitian dengan judul: **“Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas)”**

Perumusan Masalah

Dari penjelasan dan uraian yang penulis kemukakan pada latarbelakang masalah dan gejala-gejala yang dikemukakan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen aset daerah Kota Pekanbaru (studi kasus mobil dinas)?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen aset daerah Kota Pekanbaru (studi kasus mobil dinas) ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen aset daerah Kota Pekanbaru (studi kasus mobil dinas)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen aset daerah Kota Pekanbaru (studi kasus mobil dinas).

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik khususnya tentang manajemen aset
 - b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan kajian permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan atau referensi bagi Pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan manajemen aset daerah, khususnya mobil dinas.

B. Konsep Teori

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan ini. Menurut wahyuni dalam **Harbani Pasalong (2013:118)** mendefinisikan teori adalah sebagai suatu himpunan konsep, definisi dan proposisi yang berhubungan secara sistematis, yang dibangun untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena.

Konsep Manajemen

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Menurut Dalton E.Mc Ferland dalam **Brantas (2009:7)**, manajemen adalah suatu proses dimana manajer sebagai orang yang menciptakan, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama manusia.

Dalam bukunya **Hanggraeni (2011:44)** manajemen didukung beberapa sarana yang mutlak harus ada, yang disebut *The six M in Manajemen*, meliputi:

1. Faktor manusia (*Man*), yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, secara efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan.
2. Anggaran (*Money*), yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Sistem kerja (*Method*), yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha pencapaian tujuan.
4. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
5. *Machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlakukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. *Market* (Pemasaran) yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Konsep Aset

Yusuf (2015:164) harta kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah. Pengertian dimiliki/dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum negara atau daerah. Pada tingkat pemerintah pusat dikuasai oleh departemen atau lembaga, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah oleh dinas/badan/kantor.

Aset daerah banyak macamnya, aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya.

1. Golongan tanah, merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah.
2. Golongan peralatan dan mesin, adalah aset yang terkait dengan operasional internal pemerintahan, baik untuk operasional pemerintah pusat, maupun daerah. Sebelum adanya paket undang-undang tentang keuangan negaramengenai peralatan dan mesin, pentingnya cara pencatatan terkait pengelolaan peralatan dan mesin ini masih belum dirasakan. Karena

- kebutuhan laporan keuangan pemerintah daerah belum terintegrasi dengan laporan barang atau aset daerah.
3. Golongan gedung dan bangunan, adalah alat yang paling penting karena pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung.
 4. Golongan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan merupakan hal yang tidak kalah penting dengan aset lainnya. Karena wajah suatu pemerintahan daerah dinilai oleh masyarakat. Pertama-tama yang dilihat adalah kualitas jalan di wilayah tersebut karena jalan merupakan kebutuhan setiap orang.
 5. Golongan aset tetap lainnya, terdiri dari perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian.
 6. Golongan konstruksi dalam pengerjaan, golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Konsep Manajemen Aset

menurut **Siregar (2004:518)** manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dimasyarakat. Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja sekaligus menjadi indikator manajemen aset yang baik. Yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengawasan dan pengendalian dengan pengembangan sistem informasi aset. Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Adapun pengertian dari tahapan diatas adalah:

1. Inventarisasi aset

Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume atau jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-

lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal audit

Legal audit merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

3. Penilaian aset

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi aset

Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume. Dalam tahapan ini aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sector-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sedangkan aset yang tidak dioptimalkan harus dicari factor penyebabnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk

meningkatkan kinerja aspek ini adalah dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan, sehingga penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang akan dioperasionalkan agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam menganalisis. Adapun konsep yang digunakan, yaitu:

1. Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dimasyarakat. Manajemen aset adalah suatu ilmu untuk memandu pengelolaan kekayaan negara/daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga tercapai tujuan pengelolaan aset daerah, yakni:
 - a. Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 - b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah dan perolehan opini WTP terhadap manajemen aset daerah.
 - c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan manajemen aset adalah bagaimana Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan pihak terkait dalam mengatur pengelolaan mobil dinas di kota Pekanbaru. Manajemen mobil dinas sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan

kerja yaitu inventarisasi mobil dinas, legal audit mobil dinas, penilaian mobil dinas, optimalisasi mobil dinas dan pengawasan dan pengendalian dengan pengembangan sistem informasi aset.

1. Aset daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Dalam hal ini, aset daerah yang dimaksud adalah mobil dinas.
2. Mobil dinas adalah kendaraan roda empat yang merupakan barang milik daerah yang dipergunakan oleh aparatur daerah Kota Pekanbaru dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
3. Dalam penelitian ini, penulis mengambil SKPD yang mewakili Kota Pekanbaru untuk melihat bagaimana manajemen aset daerah Kota Pekanbaru yakni, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

D. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti **Moeleong (2010:134)**. Data atau informasi yang diperoleh harus ditelusuri seluas-luasnya (sedalam mungkin) agar peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh, maka dalam penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penarikan informan yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mengerti tentang masalah yang ingin diteliti. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan

tertentu, yaitu peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu siapa saja yang berkompeten memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi sehubungan dengan keseluruhan manajemen aset daerah kota pekanbaru (studi kasus mobil dinas) seperti:

1. Hasil dari wawancara dengan pihak terkait.
2. Observasi yang dilakukan penulis dilapangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer melalui sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, koran, televisi dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Data sekunder juga diperoleh dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dengan data yang diperlukan antara lain:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi BPKAD Kota Pekanbaru
- c. Data jumlah mobil dinas di Kota Pekanbaru

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan penulis secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan alat indera terutama mata dan telinga terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung, dimana peneliti datang ke tempat penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang terjadi. Dalam hal

ini peneliti juga melakukan observasi awal untuk melihat masalah yang terjadi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan observasi yang lebih mendalam lagi mengenai manajemen aset daerah kota pekanbaru yakni aset mobil dinas

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan dalam tidak berstruktur dan individual. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena dapat menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu tentang Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas).

c. Teknik Kepustakaan

Teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur maupun dokumen dari kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan masalah dari penelitian yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian, dan juga sumber lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, audio maupun elektronik

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif eksploratif yaitu analisa data yang menggali informasi secara jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal Manajemen Aset Daerah studi kasus mobil dinas di Kota Pekanbaru.

Peneliti menggunakan teknik keabsahaan data dengan *triangulasi yaitu check, re-check dan crosscheck*. *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data. Teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, studi kepustakaan, dan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Gambaran Umum Penelitian

BPKAD Kota Pekanbaru merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan aset daerah Kota Pekanbaru. Badan ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru no 10 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Inventarisasi Aset

Aset daerah sangat banyak jumlahnya, ada aset yang berbentuk lancar dan ada aset tetap, serta aset lainnya. Pada hakikatnya, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik daerah yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya, yang dikuasai pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu objek barang. Perlunya pengkodean barang inventaris berdasarkan golongan, kepemilikan dinas/kantor dan lokasi barang sesuai dengan kode masing-masing dinas/kantor di Kota Pekanbaru. Umumnya inventarisasi dilihat dari dua hal. Untuk mengetahui bagaimana inventarisasi mobil dinas di Kota Pekanbaru penulis melakukan wawancara, berikut hasil wawancaranya:

“Inventarisasi mobil dinas di Kota Pekanbaru memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena jumlah SKPD dengan pengelola sangatlah tidak seimbang, belum lagi SKPDnya yang susah diajak kerja sama. Tetapi inventarisasi yang sekarang sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dan kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin”. (Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Tanggapan yang diberikan oleh Kabag Aset, Bapak Dino Prima, menegaskan bahwa BPKAD sudah berusaha maksimal tetapi hasilnya belum maksimal, hal ini dikarenakan jumlah SKPD di Kota Pekanbaru tidak seimbang dengan jumlah pengelola aset ditambah lagi dengan banyak SKPD yang sulit diajak kerja sama.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Badan Satpol PP Kota Pekanbaru dengan menyatakan:

“Inventarisasi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, kadang kita sendiri lupa untuk memberikan laporan kadang mereka juga tidak ada memberikan informasi terkait pelaporan yang belum kami laksanakan, selain itu juga masih masih terdapat berita di media massa bahwa BPKAD selaku pengelola tidak mengetahui berapa total jumlah mobil dinas di Kota Pekanbaru. Artinya apa bahwa inventarisasi fisiknya belm berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, Bapak Budi Mulia) 05/05/2015.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Badan Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa inventarisasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 17 tahun 2007 yang juga sebagai pedoman bagi Kota Pekanbaru untuk melakukan manajemen aset, karena memang SKPD sendiri terkadang lupa untuk memberikan laporan terkait inventarisasi mobil dinas yang ada dalam penguasaannya. Dan ketika SKPD atau dalam hal ini Satpol PP sendiri lupa, badan pengelola tidak ada memberikan pemberitahuan terkait inventarisasi yang belum disampaikan

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan menyatakan:

“Inventarisasi ini hal yang sangat penting dalam melakukan manajemen aset, tapi inventarisasi inilah yang kemudian saya amati menjadi kelemahan di seluruh SKPD Kota Pekanbaru, seperti adanya pengadaan mobil dinas tetapi tidak tercatat di buku inventaris, adanya mobil dinas yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya”

Peneliti menganalisis bahwa kelemahan manajemen aset pada umumnya terletak pada inventarisasi.

Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa inventarisasi ini adalah jantungnya manajemen aset, tanpa inventarisasi kita tidak akan mengetahui jumlah, keberadaan bahkan kondisi mobil dinas. Namun yang kemudian kerap menjadi permasalahan adalah hal inventarisasi yang menyebabkan ketidakakuratan data dan fisik mobil dinas.

Peneliti kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana dengan mobil dinas yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, berikut hasilnya:

“Mobil dinas yang ada pada mantan anggota DPRD terhitung maret 2016, semuanya sudah dikembalikan, ya sekalipun memang jauh sekali keterlambatannya dari yang waktu yang seharusnya.” (Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Satpol PP Kota Pekanbaru:

“Untuk mobil dinas yang ada di Kota Pekanbaru, kita bertugas sebagai eksekutor. Dan mobil dinas mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru masih dikuasai oleh mantan anggota DPRD yakni sebanyak 5 unit. Sebelumnya itu ada 8 unit, namun kita sudah berhasil menarik 3 unit dengan persuasif”. (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, Bapak Budi Mulia) 05/05/2015.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian RT dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang lebih mengetahui mobil dinas dalam penguasaannya.

2. Legal Audit

Legal audit merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi

untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Untuk mengetahui bagaimana legal auditnya mobil dinas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, berikut hasil wawancaranya:

“Sebelum dilakukan pembelian mobil dinas, setiap SKPD harus membuat rencana pengadaan mobil dinas yang kemudian diserahkan ke BPKAD. BPKAD kemudian meneliti apakah mobil dinas ini layak diadakan untuk SKPD bersangkutan atau tidak, juga disesuaikan dengan anggaran” (Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perencanaan pengadaan mobil dinas tergantung pada BPKAD Kota Pekanbaru. Setiap SKPD hanya melakukan pengajuan saja, jika sekiranya BPKAD merasa pengadaannya layak dan didukung dengan dana maka tentulah rencana pengadaan mobil dinas diterima oleh BPKAD. Dan tidak berakhir disitu saja, selanjutnya akan dimasukkan ke RAPBD dan dilanjutkan lagi dengan APBD yang sah. Jadi tidak semata-mata dari BPKAD langsung diterima pengadaannya. Perencanaan pengadaan mobil dinas harus memperhatikan kebutuhan, dimana dibutuhkan, bilamana dibutuhkan, berapa biayanya, siapa yang menggunakannya, dan alasan kebutuhan.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, proses penilaian ini dilakukan oleh seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan *outsourcing* kepada konsultan penilai

yang profesional dan independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

Untuk mengetahui opini yang diterima Kota Pekanbaru peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, berikut pernyataan informan:

“Iya kita tahu bahwa memang opini BPK masih WDP terhadap manajemen aset Kota Pekanbaru, khusus untuk mobil dinas iya salah satu penyebabnya adalah mobil dinas yang masih dikuasai oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru.” (Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

“Kita akan lebih teliti dan respon lagi dalam mendukung manajemen aset yang baik di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka opini akan berubah menjadi WTP” (Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru yang sebagai penegak perda, dengan menyatakan:

“Kami sebagai pelaku eksekusi akan cepat dan tegas bertindak ketika ada surat perintah untuk menindaklanjuti suatu permasalahan mobil dinas. Tidak lagi seperti sekarang ini, mobil dinas mantan anggota DPRD bisa bertahan hingga ! tahun lebih tidak dikembalikan sementara masa jabatannya sudah berakhir.” Wawancara dengan Sekretaris Daerah Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, Bapak Budi Mulia) 05/05/2015.

4. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan kinerja aset yang dimiliki, suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan

untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset. Optimalisasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset, memaksimalkan penggunaan aset, dan meminimalkan biaya kepemilikan aset.

Optimalisasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut. Pada akhirnya diperoleh rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang diteliti. Adapun aset yang dimaksud adalah aset mobil dinas. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana optimalisasi mobil dinas hingga pada sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan mobil dinas di Kota Pekanbaru.

Untuk memperoleh informasi seputar pemeliharaan mobil dinas, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan, berikut wawancaranya:

“Untuk pemeliharaan mobil dinas iya disini kita memiliki anggaran dek, setiap tahun itu selalu diadakan. Jadi setiap SKPD itu sudah memiliki anggaran tersendiri untuk pemeliharaan mobil dinas dikantor masing-masing. (Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa setiap tahunnya seluruh SKPD di Kota Pekanbaru memiliki anggaran untuk pemeliharaan mobil dinas. Untuk berapa besarnya setiap SKPD yang mengetahuinya. Peneliti menilai bahwa anggaran untuk pemeliharaan mobil dinas setiap tahunnya cukup besar, dapat dilihat dari jumlah SKPD di Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 44 SKPD.

Menyambung apa yang dinyatakan oleh Kabag Aset, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang pegawai

di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, berikut hasil wawancaranya:

“Pemeliharaan mobil dinas di SKPD ini, kurang lebih 800juta dalam satu tahun anggaran. Dan setiap tahunnya anggaran ini biasanya tidak bersisa”. (Wawancara dengan Bang Baginda Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 11/06/16).

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa untuk SKPD Sekretariat Daerah, anggaran untuk pemeliharaan mobil dinas diperkirakan kurang lebih 800juta pertahunnya dan biasanya anggaran ini tidak bersisa. Anggaran untuk pemeliharaan mobil dinas ini cukup besar, manajemen aset menuntut pelaksanaan optimalisasi aset dengan memaksimalkan penggunaan aset dan meminimalkan biaya. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, untuk optimalisasi dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan penggunaan belum dapat terlaksana.

“Sudah cukup optimal, karena kita sekarang sudah mulai menggunakan SIMDA jadi lebih mudah untuk mengontrol pengelolaan mobil dinasnya. Memang belum sepenuhnya maksimal karena sistem ini harus dikuasai terlebih dahulu oleh sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem ini, kedepan kita akan membuat pelatihan sehingga semua sumber daya mampu menggunakan sistemnya. Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis bahwa mobil dinas belum optimal karena memang masih banyak mobil dinas yang berkeliaran tidak pada jam kerja ataupun pada hari libur. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat Kota Pekanbaru bahwa pada jam kerja beliau mendapati mobil dinas parkir disebuah salon yang ada dijalan durian. Pada dasarnya mobil dinas digunakan untuk kepentingan dinas, dari kasus diatas

terlihatlah bahwa mobil dinas belum dipergunakan secara optimal.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini.

Pengawasan mobil dinas adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan manajemen aset daerah sesuai dengan standar atau peraturan yang sudah ditetapkan. Sementara pengendalian adalah apabila dalam pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan dalam manajemen aset daerah maka segera diambil tindakan koreksi.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan pengendalian mobil dinas di Kota Pekanbaru peneliti melakukan wawancara dengan Kabag Aset, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pengawasan bukan bagian kita, ya diserahkan kepada SKPD masing-masing. Sistem pengawasan dan bagaimana standarnya tergantung kebijakan SKPD bukan lagi tanggung jawab kami. Bila perlu setiap SKPD bisa menurunkan surat perintah kepada Satpol PP” Wawancara dengan Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Bapak Dino Prima, 09/4/2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengawas mobil dinas bukan lagi BPKAD tetapi setiap SKPD harus bertanggung jawab atas mobil dinas yang ada dalam penguasaannya, dan bila perlu setiap SKPD bisa meminta bantuan Satpol PP untuk melakukan pengawasan atau tindak lanjut. Peneliti menilai bahwa BPKAD tidak boleh lepas dari pengawasan, karena dipedoman pengelolaan barang milik daerah pada pasal 83 jelas dikatakan bahwa ada kewenangan dari BPKAD untuk melakukan pemantauan dan investigasi

atas pelaksanaan penggunaan yang dilakukan oleh pengguna mobil dinas. Jadi ketika BPKAD melihat ada mobil dinas yang melakukan penyalahgunaan, maka ada kewenangan dari BPKAD untuk melakukan tindak lanjut atau meminta bantuan dari pengawas fungsiona

Lebih jelas lagi peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pengguna mobil dinas, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pengawas saya kira semua harus ikut berpartisipasi lah ya, karena mobil dinas ini memang sensitif. Berbicara penggunaan yang sesuai dengan peraturan, jujur saya katakan sulit untuk diterapkan. Karena dalam hal aset mobil dinas ini, pengguna yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang sadar akan pelayanan”. (wawancara dengan salah seorang pengguna mobil dinas, Bapak Mus 21/06/2016).

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengguna mobil dinas, dapat diketahui bahwa untuk mengawasi mobil dinas perlu partisipasi dari keseluruhan pihak yang terkait karena memang mobil dinas merupakan aset yang cukup sensitif. Untuk menciptakan penggunaannya yang sesuai dengan peraturan, maka setiap pengguna mobil dinas itu harus lebih dalam memahami dirinya akan seorang pelayan masyarakat. Peneliti melihat bahwa pengawasan mobil dinas perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan manajemen aset, karena dengan pengawasan maka mobil dinas akan dipergunakan sesuai pada perda. Seperti hasil wawancara diatas, bahwa memang sumber daya manusia adalah pokok dari manajemen aset.

G. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang manajemen aset daerah Kota Pekanbaru (studi kasus mobil dinas), maka dapat disimpulkan bahwa manajemen aset daerah Kota Pekanbaru

(studi kasus mobil dinas), kurang maksimal.

Peneliti memberikan kesimpulan dengan berpedoman pada kosep teori yang dikemukakan Siregar dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Inventarisasi: kurangnya perhatian dan kemampuan setiap SKPD dalam melakukan pencatatan mobil dinas yang ada dalam penguasaannya, lemahnya pelaporan keberadaan dan jumlah mobil dinas.
2. Legal Audit: lemahnya status penguasaan mobil dinas sehingga ada mobil dinas yang tidak dapat diketahui keberadaannya. Kemudian status pinjam pakai mobil dinas yang ada di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru hingga saat ini belum juga kelar. Masih ada mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang enggan mengembalikan mobil dinas.
3. Penilaian Aset: belum baik, terlihat dari opini BPK RI Perwakilan Riau terhadap manajemen aset daerah Kota Pekanbaru dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
4. Optimalisasi Aset: mobil dinas belum bisa dioptimalkan dengan maksimal, karena masih banyak pengguna mobil dinas yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi dan bukan untuk keperluan kedinasan.
5. Pengawasan dan Pengendalian: pengawasan menjadi hal yang utaman untuk melihat bagaimana penggunaan mobil dinas. Pengawasan di Kota Pekanbaru belum ada standarnya. Antara satu pihak dengan yang lain saling mengalihkan tugas terkait pengawasan.

Manajemen aset merupakan hal yang sangat penting dalam penataan aset daerah. Dengan terwujudnya manajemen aset yang baik, maka dapat dipastikan keberadaan aset daerah Kota Pekanbaru optimal dan benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sehingga dengan adanya aset

maka dapat mendorong terwujudnya pelayanan kepada masyarakat.

Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang telah ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, SKPD Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru khususnya, serta seluruh SKPD di Kota Pekanbaru pada umumnya sebagai berikut:

1. Untuk mendukung manajemen aset khususnya mobil dinas agar menjadi maksimal sangatlah diperlukan sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan jiwa pelayanan yang tinggi. Karena dengan demikian, maka mobil dinas agar tepat pada peruntukannya dan setiap tanggungjawab yang berkenaan dengan mobil dinas dapat terselesaikan, misalnya pencatatan, pelaporan dan lain-lain.
2. Diharapkan kepada seluruh SKPD untuk bisa bekerja sama, rutin memberikan laporan terkait mobil dinas yang ada dalam penguasaannya serta mengarahkan seluruh pengguna mobil dinas untuk dapat mengoptima
3. Perlunya sosialisasi serta pelatihan sistem informasi manajemen aset daerah (SIMDA) kepada setiap pegawai yang ada di setiap SKPD terkhusus di BPKAD Kota Pekanbaru sehingga manajemen aset daerah dapat dijalankan dengan menggunakan sistem. Karena dengan penggunaan SIMDA, maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap manajemen aset pada khususnya mobil dinas.
4. Perlunya standar pengawasan serta pengendalian yang jelas terhadap manajemen aset khususnya mobil dinas, sehingga baik maupun pencatatan dapat berlangsung baik. Dengan pengawasan, maka

penggunaan mobil dinas akan maksimal karena pengguna mobil dinas tidak lagi semena-mena dalam penggunaan mobil dinas. Sistem pengawasan salah satunya bisa dibuat sebuah sistem yang berbasis Global Position System (GPS). Dengan menggunakan sistem ini pihak pengawas yang sudah ditunjuk dapat melakukan pengawasan secara langsung jika ada mobil dinas yang digunakan tidak sesuai aturan. Sehingga dapat dilakukan tindakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

5. Sesuai dari saran masyarakat, sebaiknya anggaran untuk mobil dinas khususnya anggaran pemeliharaan dapat dikurangi dan dialihkan ke hal yang lebih perlu yang membantu rakyat kemudian untuk ketepatan penggunaan, ada baiknya dibuat stiker dimobil dinas sehingga ketika pengguna menggunakannya tidak untuk dinas mereka ada rasa keseganan tersendiri didepan publik.
6. Sebaiknya sanksi bagi setiap pejabat yang melanggar dapat dilakukan penerapan sanksinya. Sehingga mereka tidak merasa tenang saja ketika melakukan pelanggaran, pemerintah harus lebih tegas menyikapi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta: Yudistira.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hadinata, Acep. 2011. *Modul Ajar Manajemen Aset*. Jakarta: POLBAN
- Handoko T. Hani. 2003. *Manajer Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2008. *Pengawasan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Hanggraeni, Dewi. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Timur: LP FEUI.

Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. Jakarta Timur: Alfabeta.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, YKPN, Yogyakarta*.

Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong .2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian, P. Sondang. 2003. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.

Siregar, D.D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Sugiana A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 2005. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Pers.

Sutedi, Adrian. 2009. *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM.

Terry, George R.2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, M. 2015. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Dokumen

Peraturan daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2008
 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014
 Peraturan Menteri dalam Negeri No 27 Tahun 2007

Karya Ilmiah

Erizul , 2014. *Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar*. Jurusan Administrasi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru.

Internet

Manajemen Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2010. (www.kumoro.staff.ugm.ac.id dikutip pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 22.10)